



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Untuk Periode yang berakhir 30 Juni 2020

Bagian Anggaran 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Tangkerang Labuai, Kota Pekanbaru

Telp. (0761) 572855

Website: www.pa-pekanbaru.go.id Email: umum.papekanbaru@gmail.com

PEKANBARU – RIAU 28289

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

LPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang berakhir 30 Juni Tahun 2020

Bagian Anggaran 005.01

Jln. Datuk Setia Maharaja/Parit Indah,Tangkerang Labuai

Kota Pekanbaru – Riau 28289

Telp. (0761) 572855

Email: umum.papekanbaru@gmail.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Pekanbaru adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pekanbaru mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Pekanbaru. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Pekanbaru, 14 Juli 2020

Sekretaris,

SAMSIR TOONA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
Laporan Realisasi Anggaran	3
Neraca	4
Laporan Operasional	5
Laporan Perubahan Ekuitas	6
Catatan atas Laporan Keuangan	7
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	22
Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	29
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	39
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	44
Pengungkapan Penting Lainnya	46
Lampiran dan Daftar	



PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1A

Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Tangkerang Labuai, Kota Pekanbaru

Telp. (0761) 572855 Fax. (0761) 839718

Website: www.pa-pekanbaru.go.id Email: 402072.papbr@gmail.com

PEKANBARU – RIAU 28289

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pekanbaru yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pekanbaru, 14 Juli 2020

Sekretaris,



SAMSIR TOONA

NIP 19780312 20031003

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pekanbaru Semester I 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I Tahun 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp546.000 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada Semester I Tahun 2020 adalah sebesar Rp5.389.138.584 atau mencapai 43 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp12.622.597.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2020. Nilai Aset per 30 Juni 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp29.424.520.273 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp37.866.748; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp29.385.424.820; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1.228.705.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp30.000.000 dan Rp29.394.520.273.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp1.995.000, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp5.644.942.135 sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(5.642.947.135). Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-

masing sebesar Rp471.032 dan sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(5.642.476.103).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp29.647.204.792 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(5.642.476.103). ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp1.199.000 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp5.388.592.584 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2020 adalah senilai Rp29.394.520.273.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester I Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	SEMESTER I TA 2020		% thd Angg	TA 2019
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	546.000	-	23.204.071
JUMLAH PENDAPATAN		-	546.000	-	23.204.071
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	11.002.695.000	4.593.310.963	41,75	5.655.204.140
Belanja Barang	B.4	1.594.902.000	770.827.621	48,33	607.729.847
Belanja Modal	B.5	25.000.000	25.000.000	100,00	65.000.000
JUMLAH BELANJA		12.622.597.000	5.389.138.584	42,69	6.327.933.987

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
NERACA
PER 30 JUNI 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	SMTR I TA 2020	2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	30.000.000	-
Belanja Dibayar di Muka	C.2	-	-
Persediaan	C.3	7.866.748	2.174.000
Jumlah Aset Lancar		37.866.748	2.174.000
ASET TETAP			
Tanah	C.4	18.285.402.000	18.285.402.000
Peralatan dan Mesin	C.5	3.379.881.628	3.354.881.628
Gedung dan Bangunan	C.6	11.129.445.240	11.129.445.240
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.7	68.696.200	68.696.200
Aset Tetap Lainnya	C.8	977.900	977.900
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.9	(3.478.978.148)	(3.175.701.967)
Jumlah Aset Tetap		29.385.424.820	29.663.701.001
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.10	8.881.972	8.881.972
Aset Lain-Lain	C.11	14.950.000	14.950.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.12	(22.603.267)	(21.988.915)
Jumlah Aset Lainnya		1.228.705	1.843.057
JUMLAH ASET		29.424.520.273	29.667.718.058
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada piha ketiga	C.13	-	19.065.191
Pendapatan diterima dimuka	C.14	-	1.449.000
Uang muka dari KPPN	C.15	30.000.000	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		30.000.000	20.514.191
JUMLAH KEWAJIBAN		30.000.000	20.514.191
EKUITAS			
Ekuitas	C.13	29.394.520.273	29.647.204.792
JUMLAH EKUITAS		29.394.520.273	29.647.204.792
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		29.424.520.273	29.667.718.983

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	SMTRI THN 2020	2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.995.000	11.383.560
JUMLAH PENDAPATAN		1.995.000	11.383.560
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	4.592.981.483	5.660.361.540
Beban Persediaan	D.3	13.520.422	34.061.736
Beban Barang dan Jasa	D.4	532.449.744	357.637.729
Beban Pemeliharaan	D.5	184.687.970	185.531.930
Beban Perjalanan Dinas	D.6	16.212.983	20.220.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	305.089.533	344.532.885
JUMLAH BEBAN		5.644.942.135	6.602.345.820
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(5.642.947.135)	(6.590.962.260)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan pelepasan Aset Non Lancar	D.8	-	3.436.000
Beban pelepasan Aset Non Lancar	D.9	-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.10	-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.11	-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.12	1.228.900	1.477.024
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	757.868	297.205
Lainnya		471.032	4.615.819
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		471.032	4.615.819
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa	D.14	-	-
Surplus/ (defisit) Dari Pos Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(5.642.476.103)	(6.586.346.441)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	SMTR I THN 2020	2019
EKUITAS AWAL	E.1	29.647.204.792	29.958.419.572
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(5.642.476.103)	(6.586.346.441)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.5	1.199.000	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		5.388.592.584	6.400.209.428
Setoran Surplus BLU	E.4	-	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(252.684.519)	(186.137.013)
EKUITAS AKHIR	E.6	29.394.520.273	29.772.282.559

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Pekanbaru

Dasar Hukum *Entitas dan* *Rencana* *Strategis*

Pengadilan Agama Pekanbaru adalah salah satu dari 420 peradilan tingkat pertama pada lingkungan Peradilan Agama yang eksistensinya diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Perubahan ke III pada Pasal 24 ayat (2) bersama-sama dengan tiga lingkungan peradilan lainnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai peradilan tingkat pertama berada pada urutan pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Berdirinya Pengadilan Agama Pekanbaru adalah sebagai konsekuensi dari dijadikannya Pekanbaru sebagai ibu kota Kota Pekanbaru karena Pengadilan Agama berada dalam Kota atau Kabupaten yang wilayah hukumnya adalah Kota atau Kabupaten.

Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai lembaga yudikatif yang menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melayani masyarakat di bidang hukum yang dalam pelaksanaannya harus transparan, akuntabel, dapat di akses oleh publik.

Visi Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2020 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2015–2020 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2015 sampai dengan 2020 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi

Pengadilan Agama Pekanbaru.

Visi Mahkamah Agung adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai Visi dan Misinya.

Visi Pengadilan Agama Pekanbaru adalah “TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU YANG AGUNG”.

Misi Pengadilan Agama Pekanbaru adalah:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan

Agama Pekanbaru melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelesaian perkara;
2. Meningkatkan akseptabilitas putusan Hakim;
3. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice);
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
6. Meningkatkan kualitas pengawasan.

Sehingga dalam penyusunan Laporan Keuangan ini berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2016 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2015 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2019 Tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 Tentang Masa Manfaat dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;

11. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP 658/PB/2019 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP 617/PB/2019 Tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar;

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Pekanbaru. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Pekanbaru menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Pekanbaru. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pekanbaru

adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai

nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c.Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir Semester tanpa

memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap Semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak	50

Ekonomi Produser Fonogram.	
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan

kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, **Pengadilan Agama Pekanbaru** telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal dalam hal ini terkait dengan penyesuaian Halaman III DIPA.

Realisasi
Pendapatan
Rp546.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebesar 546.000 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Pengadilan Agama Pekanbaru terdiri dari Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN dan Pendapatan dari Pemanfaatan BMN dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	SMTR I THN 2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN	-	-	-
Pendapatan sewa tana, gedung dan bangunan	-	546.000	-
Penerimaan kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	-
Jumlah	-	546.000	-

Realisasi Pendapatan Pengadilan Agama Pekanbaru periode Semester I Tahun 2020 mengalami penurunan 95.67 persen dibandingkan tahun 2019. Hal ini disebabkan antara oleh karena pada Tahun 2020 tidak ada pendapatan dari pemindahtanganan BMN maupun penerimaan dari persekot gaji.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester I 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI SMTR I 2020	REALISASI T.A. 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari pemindahtanganan BMN	-	3.436.000	0,00
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	546.000	2.730.000	-80,00
Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji	-	6.448.560	-100,00
Jumlah	546.000	12.614.560	-95,67

Realisasi Belanja
Negara
Rp5.389.138.584

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Pengadilan Agama Pekanbaru pada Semester I Tahun 2020 adalah sebesar Rp5.389.138.584 atau 42.69% dari anggaran belanja sebesar Rp12.662.597.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester I Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I 2020

Uraian	SEMESTER I 2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	11.002.695.000	4.593.310.963	41,75
Belanja Barang	1.594.902.000	770.827.621	48,33
Belanja Modal	25.000.000	25.000.000	100,00
Total Belanja Kotor	12.622.597.000	5.389.138.584	42,69
Pengembalian	-	170	-
Jumlah	12.622.597.000	5.389.138.414	42,69

Dibandingkan dengan TA 2019, Realisasi Belanja Semester I 2020 mengalami penurunan sebesar 14.84% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Belanja pegawai yang menurun diakibatkan oleh adanya mutasi beberapa Hakim ke Satker lain yang berdampak pada realisasi belanja pegawai.
2. Belanja modal TA. 2020 lebih sedikit dibandingkan dengan belanja modal pada TA. 2020 sehingga berdampak menurunnya realisasi belanja modal TA. 2020 dibandingkan dengan TA. 2019.

Perbandingan Realisasi Belanja Semester I Tahun 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI SMTR I 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	4.593.310.963	5.655.204.141	(18,78)
Belanja Barang	770.827.621	607.729.847	26,84
Belanja Modal	25.000.000	65.000.000	(61,54)
Jumlah	5.389.138.584	6.327.933.988	(14,84)

Belanja Pegawai B.3 Belanja Pegawai

Rp4.593.310.963

Realisasi Belanja Pegawai Semester I 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.593.310.963 dan Rp5.655.204.414. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS. Realisasi belanja Semester I 2020 mengalami penurunan sebesar 18.78 persen dari TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya mutasi hakim ke satker lain.

Perbandingan Belanja Pegawai Semester I 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI SMTR I 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	1.530.426.280	1.758.906.260	(12,99)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	18.932	24.334	(22,20)
Belanja Tunj. Suami/Isteri PNS	119.940.030	140.120.164	(14,40)
Belanja Tunj. Anak PNS	32.394.354	38.266.101	(15,34)
Belanja Tunj. Struktural PNS	20.160.000	20.160.000	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	2.173.055.000	2.815.730.000	(22,82)
Belanja Tunj. PPh PNS	290.073.357	419.908.053	(30,92)
Belanja Tunj. Beras PNS	67.278.180	74.302.920	(9,45)
Belanja Uang Makan PNS	196.980.000	206.200.000	(4,47)
Belanja Tunjangan Umum PNS	7.735.000	10.140.000	(23,72)
Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	155.250.000	171.450.000	(9,45)
Jumlah Belanja Kotor	4.593.311.133	5.655.207.832	(18,78)
Pengembalian Belanja Pegawai	-	3.691	(100,00)
Jumlah Belanja	4.593.311.133	5.655.204.141	(18,78)

Belanja Barang B.4 Belanja Barang

Rp770.827.621

Realisasi Belanja Barang Semester I 2020 dan 20208 adalah masing-masing sebesar Rp770.827.621 dan Rp607.729.847. Realisasi Belanja Barang Semester I 2020 mengalami kenaikan 26.84% dari Realisasi Belanja Barang TA 2019. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya belanja barang khususnya

belanja sewa rumah dinas hakim. Selain itu juga, belanja operasional bertambah antara lain honor PPNNP dan juga biaya langganan internet meningkat menjadi 100 Mbps dari 50 Mbps tahun 2019.

Perbandingan Belanja Barang Semester I 2020 dan 2019

Belanja perjalanan dinas	16.212.983	20.220.000	(19,82)
Belanja Keperluan Perkantoran	314.800.324	187.031.697	68,31
Belanja Pengiriman Surat Dinas	891.500	996.000	(10,49)
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	18.450.000	18.450.000	-
Belanja Barang Operasional Lainnya	37.913.734	37.146.400	2,07
Belanja Barang Persediaan	23.052.313	53.409.170	(56,84)
Belanja Bahan	0	489.250	100,00
Belanja Langganan Listrik	90.257.784	114.678.270	(21,29)
Belanja Langganan Telepon	1.122.113	1.331.312	(15,71)
Belanja Sewa	87.750.000	0	100,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	144.409.185	90.721.541	59,18
Belanja Pemeliharaan peralatan dan mesin	35.967.685	83.256.007	(56,80)
Jumlah Belanja	770.827.621	607.729.647	26,84

Belanja Modal
Rp25.000.000

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Semester I 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp25.000.000 dan Rp65.000.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Semester I 2020 mengalami penurunan sebesar 61,54% dibandingkan TA 2019 disebabkan oleh berkurangnya anggaran belanja modal TA. 2020 dibandingkan dengan 2019.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Semester I 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI SMTR I 2020	REALISASI T.A 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal P.C Unit	25.000.000	65.000.000	(61,54)
Jumlah Belanja	25.000.000	65.000.000	-61,54

Belanja Modal
Tanah Rp0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Semester I 2020 dan TA 2019

adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Hal ini disebabkan tidak ada anggaran untuk belanja modal tanah.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Semester I 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI SMTR I 2019	REALISASI T.A 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0.00
Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0.00
Jumlah Belanja	0	0	0

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp25.000.000

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester I 2020 adalah sebesar Rp25.000.000, mengalami penurunan sebesar 61.54 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp65.000.000. Hal ini disebabkan oleh belanja modal peralatan dan mesin pada TA 2020 terbatas hanya untuk pengadaan P.C. Unit saja yang jumlahnya 2 unit dengan anggaran senilai Rp25.000.000 dibanding TA 2019 anggaran belanja modal peralatan dan mesin mencapai Rp102.500.000,.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester I 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI SMTR I 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Komputer Unit	25.000.000	0	100,00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	0	0	100,00
Pengadaan Laptop	0	65.000.000	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	25.000.000	65.000.000	-61,54
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	25.000.000	65.000.000	38,46

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp0

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Semester I 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp94.684.000,00. Realisasi

Belanja Modal Semester I 2020 mengalami penurunan sebesar 100 persen dibandingkan Realisasi TA 2019. Hal ini disebabkan pada TA. 2020 tidak ada anggaran belanja modal gedung dan bangunan.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
Semester I 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI SMTR I 2019	REALISASI T.A 2018	NAIK (TURUN) %
Gedung Pos Jaga Satpam	-	94.684.000	-100,00
Jumlah Belanja	-	94.684.000	-100,00

Belanja Modal
Jalan, Irigasi, dan
Jaringan Rp0

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Semester I 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Semester I 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI SMTR I 2019	REALISASI T.A 2018	Naik (Turun)
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Belanja Modal
Lainnya Rp0

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester I 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0.

Belanja Bantuan
Sosial Rp0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Semester I 2020 dan 2019 masing-masing Rp0.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp30.000.000

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp30.000.000 dan Rp50.000.000 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Semester I 2020 dan 2019

Keterangan	SMTR I 2020	TH. 2019
Uang Tunai	9.828.212	39.865.338
Kuitansi Yang Belum di-SP2D-kan	20.171.788	10.134.662
Jumlah	30.000.000	50.000.000

Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar masing-masing Rp0. Selain itu juga Pengadilan Agama Pekanbaru tidak memiliki rekening bendahara penerimaan.

Kas Lainnya
dan Setara
Kas Rp0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0.

Piutang
PNBP Rp0

4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0.

Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp0

5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0.

Bagian Lancar
C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

TPA
Rp0
Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0.

Penyisihan
C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Lancar
Rp0
Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0.

Belanja
C.8 Belanja Dibayar di Muka

Dibayar di
Muka Rp0
Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka Semester I 2020 dan 2020

Jenis	SMTR I 2020	TH 2019
Pembayaran persekot/uang muka gaji	-	-
Jumlah	-	-

Pendapatan
C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

yang Masih
Harus
Diterima Rp0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

Persediaan
Rp7.866.748

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp7.866.748 dan Rp2.174.925.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Semester I 2020 dan 2019

Jenis	SMTR I 2020	TH 2019
Barang Konsumsi	5.721.330	1.823.425
Bahan Untuk Pemeliharaan	2.145.418	351.500
Jumlah	7.866.748	2.174.925

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan
TP/TGR
Rp0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp0

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah
Rp18.339.971.00
0,00

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Pekanbaru per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp18.339.971.000,00 dan Rp18.339.971.000,00.

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

No	Luas	Lokasi	Nilai Perolehan
1	100 m2	Jl. Kesadaran	54,800,000
2	844 m2	Jl. Kesadaran	480,000,000
3	9.542 m2	Jl. Nurul Amal Kel. Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru	1,196,742,380
4	274 m2	Jl. Kembang Sari Kel. Cinta Raja Kec. Sail, Pekanbaru	341,130,000
5	400 m2	Jl. Rawa Indah No. 1 Kota Pekanbaru	80,000,000
6	1.250 m2	Jl. Rawa Indah No. 1 Kota Pekanbaru	316,750,000
7	3.892 m2	Jl. Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Pekanbaru	915,780,000
8	400 m2	Jl. Rawa Indah No. 1 Kota Pekanbaru	101,410,000
9	1.250 m2	Jl. Rawa Indah No. 1 Kota Pekanbaru	316,750,000
10	1.000 m2	Jl. Bunga Kertas No. 21 Kel. Kedung Sari, Pekanbaru	1,217,650,000
11	1.181 m2	Jl. Rawa Indah No. 1 Kota Pekanbaru	301,089,200
12	1.188 m2	Jl. Rawa Indah No. 1 Kota Pekanbaru	301,089,200
Jumlah			5,623,190,780

Peralatan dan
Mesin
Rp3.379.881.628

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah Rp3.379.881.628 dan Rp3.149.346.028. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	3.354.881.628
Mutasi tambah:	
Pembelian	25.000.000
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 30 Juni 2020	3.379.881.628
	(2.621.444.681)
Nilai Buku per 30 Juni 2020	758.436.947

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa pembelian P.C. Unit sebanyak 2 unit senilai Rp25.000.000

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan
Bangunan
Rp11.129.445.240
0

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah Rp11.129.445.240 dan Rp10.950.485.240. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	11.129.445.240
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2020	11.129.445.240
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2020	(706.270.920)
Nilai Buku per 30 Juni 2020	10.423.174.320

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan,Jaringan
dan Irigasi
Rp68.696.200,00
0

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp68.696.200,00 dan Rp68.696.200,00. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	68.696.200
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2020	68.696.200
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2020	(19.520.993)
	0
	49.175.207

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap
Lainnya
Rp977.900

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah Rp977.900 dan Rp977.900. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2020, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	977.900
Mutasi tambah:	0
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 30 Juni 20120	977.900
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	0
Nilai Buku per 30 Juni 2020	977.900

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0.

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp(3.478.978.148) dan

Rp(3.478.978.148) Rp(3.175.701.967). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 30 Juni 2020

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	3.379.881.628	-2.621.444.681	6.001.326.309
2	Gedung dan Bangunan	11.129.445.240	-838.012.474	11.967.457.714
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	68.696.200	-19.520.993	88.217.193
4	Aset Tetap Lainnya	977.900	0	977.900
Akumulasi Penyusutan		14.579.000.968	-3.478.978.148	18.057.979.116

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak Berwujud
Rp8.881.972,00

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah Rp8.881.972,00 dan Rp8.881.972,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Agama Pekanbaru berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	8.881.972
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2020	8.881.972
Akumulasi Amortisasi s.d. 30 Juni 2020	(7.653.267)
Nilai Buku per 30 Juni 2020	1.228.705

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud per 30 Juni 2020

Uraian	Nilai Perolehan
Sofwere	8.881.972
Jumlah	8.881.972

Aset Lain-
Lain
Rp14.950.000

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Rp14.950.000 dan Rp14.950.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	14.950.000
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 30 Juni 2020	14.950.000
Akumulasi Penyusutan per 30 juni 2020	(14.950.000)
Nilai Buku per 30 juni 2020	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan
dan
Amortisasi
Aset Lainnya
Rp((22.603.267
)

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp(22.603.267) dan Rp(21.988.915). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 juni 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	8.881.972	-7.653.267	1.228.705
Jumlah	8.881.972	-7.653.267	1.228.705
Aset Lain-lain	14.950.000	-14.950.000	0
Jumlah	23.831.972	-22.603.267	1.228.705

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka
dari KPPN
Rp30.000.000

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp30.000.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp0

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp0

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya yang jangka waktunya lebih dari satu tahun.

Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp00

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2020 dan 2019 sebesar Rp0 dan Rp20.514.191, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar Semester I
2020 dan 2019

Uraian	SMTR I 2020	TH 2019
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	329.480
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	18.735.711
Pendapatan diterima dimuka	-	1.449.000
Jumlah	-	20.514.191

Ekuitas
Rp29.424.520.273

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp29.424.520.273 dan Rp29.667.718.983,. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan

PNBP

Rp1.995.000

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp1.995.000 dan Rp11.383.560. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Semester I 2020 dan 2019

Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji	0	6.448.560	(100)
Jumlah	1.995.000	11.383.560	(82)

Beban Pegawai

Rp4.592.981.483

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Semester I 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.592.981.483 dan Rp5.660.361.540. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara maupun PNS.

Rincian Beban Pegawai Semester I 2020 dan 2019

Beban Gaji Pokok PNS	1.530.186.780	1.763.526.020	-13
Beban Pembulatan Gaji PNS	18.906	24.311	-22
Beban Tunj. Suami/ Isteri PNS	119.916.080	140.626.000	-15
Beban Tunj. Anak PNS	32.394.354	38.468.435	-16
Beban Tunj. Struktural PNS	20.093.996	20.160.000	-0
Beban Tunj. Fungsional PNS	2.173.055.000	2.815.730.000	-23
Beban Tunj. PPh PNS	290.073.357	419.737.545	-31
Beban Tunj. Beras PNS	67.278.180	74.302.920	-9
Beban Tunj. Uang Makan PNS	196.980.000	206.200.000	-4
Beban Tunj. Umum PNS	7.735.000	10.140.000	-24
Beban Tunj. Kemahalan Hakim	155.250.000	171.450.000	-9
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-	3.691	-100
Jumlah	4.592.981.653	5.660.361.540	-19

Beban Persediaan

Rp13.520.422

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Semester I 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp13.520.422 dan Rp34.061.736. Beban

Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Semester I 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Semester I 2020 dan 2019

Beban Persediaan Konsumsi	13.520.422	34.061.736	-60
Jumlah	13.520.422	34.061.736	-60

Beban Barang
dan Jasa
Rp532.449.744

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Semester I 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp532.449.744 dan Rp351.637.729. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya tambahan kenaikan honor PPNPN dan adanya bantuan sewa rumah dinas untuk hakim. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Semester I 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Semester I 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	SMTR I 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban keperluan perkantoran	313.252.324	184.546.497	69,74
Beban pengiriman surat dinas pos pusat	891.500	996.000	(10,49)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	18.450.000	18.450.000	0,00
Beban Barang Operasional Lainnya	37.913.734	31.146.400	21,73
Beban Bahan	0	489.250	100,00
Beban Langganan Listrik	73.345.334	114.678.270	(36,04)
Beban Langganan Telepon	846.852	1.331.312	(36,39)
Beban Sewa	87.750.000	0	100,00
Jumlah	532.449.744	351.637.729	51,42

Beban
Pemeliharaan
Rp184.687.970

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Semester I 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp184.687.970 dan Rp185.531.930. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pemeliharaan gedung dan bangunan dalam rangka menjamin sarana dan sarana gedung memadai untuk pelayanan terhadap para pencari keadilan. Rincian beban pemeliharaan untuk Semester I 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Semester I 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	SMTR I 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	144.409.185	90.721.541	59,18
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.967.685	83.256.007	(56,80)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	4.311.100	11.554.382	(62,69)
Jumlah	184.687.970	185.531.930	(0,45)

Beban Perjalanan
Dinas
Rp16.212.983

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Semester I 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp16.212.983 dan Rp20.220.000. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan beban perjalanan dinas disebabkan oleh adanya pembatasan bepergian ke luar kota akibat pencegahan penularan virus Corona-19. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Semester I 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester I 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	SMTR I 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	15.762.983	20.070.000	-21,46
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	450.000	150.000	200,00
Jumlah	16.212.983	20.220.000	-19,82

Beban Barang
untuk Diserahkan

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

kepada
Masyarakat
Rp0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester I 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Beban Bantuan
Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Semester I 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp305.089.533

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Semester I 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp305.089.533 dan Rp344.532.885. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun Semester I 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Semester I 2020 dan 2019

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	SMTR I 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	171.874.924	207.717.909	1,45
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	131.741.554	129.857.764	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	858.703	858.703	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	5.484.156	(11,47)
Jumlah Penyusutan	304.475.181	343.918.532	(11,47)
Beban Amortisasi Software	614.353	614.353	-
Jumlah Amortisasi	614.353	614.353	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	305.089.534	344.532.885	(11,45)

Beban Penyisihan

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Piutang Tak
Tertagih Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp471.032

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Semester I 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Semester I 2020 dan 2019

URAIAN	SMTR I 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Penjualan Alat Angkut Darat	0	3.436.000	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TA Yang Lalu	0	0	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	1.228.900	1.477.024	(16,80)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	757.868	297.205	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	471.032	4.615.819	(89,80)

*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

Pos Luar Biasa
Rp0

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp29.647.204.792

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp29.647.204.792 dan Rp29.958.419.572.

Defisit LO

Rp(5.642.476.103)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp(5.642.476.103) dan Rp(6.586.346.661). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian

Nilai Aset

Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk Semester I 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0.

Selisih Revaluasi

Aset Tetap Rp0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0.

Koreksi Aset Tetap

Non Revaluasi

Rp0

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0.

Koreksi Lain-Lain **E.3.6 Koreksi Lain-Lain**

Rp0

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar **E.4 Transaksi Antar Entitas**

Entitas

Rp5.388.592.284

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp5.388.592.284 dan Rp6.400.209.428. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	5.389.138.584
Diterima dari Entitas Lain	(546.000)
Pengesahan Hibah Langsung	-
Jumlah	5.388.592.584

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2020, DDEL sebesar Rp5.388.592.584 sedangkan DKEL sebesar Rp(546.000).

E.4.2 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan

tanggal 30 Juni 2020 masing-masing Rp0.

Ekuitas Akhir
Rp29.394.520.273

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp29.394.520.273 dan Rp29.772.282.559

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada bulan Februari 2020 Pengadilan Agama Pekanbaru melakukan revisi penyesuaian halaman III DIPA. Dan pada kurun waktu triwulan II Tahun 2020 ada pembatasan pengajuan SPM GUP dikarenakan situasi pandemic Covid-19.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang di terima oleh Pengadilan Agama Pekanbaru terdapat biaya yang dititipkan oleh pihak ketiga yang ditampung pada rekening pemerintah lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Keadaan Keuangan					
	Saldo Awal 01 Januari 2020	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir 30 Juni 2020	Kas di Bank	Kas di Brankas
Biaya Perkara	175.957.450	912.745.000	885.922.800	202.779.650	193.942.900	8.836.750
Biaya Eksekusi	102.300.900	30.200.000	32.715.500	99.785.400	99.371.800	413.600
Biaya Konsinyasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	278.258.350,00	942.945.000,00	918.638.300,00	302.565.050,00	293.314.700,00	9.250.350,00

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,
Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2020

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Nilai Buku
		Manfaat		Per 30-06-2020	Per 30-06-2020	Per 30-06-2020	Per 30-06-2020
A	Tanah						
1	Tanah	-	18.285.402.000	-	-	-	18.285.402.000
	Jumlah		18.285.402.000	-	-	-	18.285.402.000
B	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	423.515.003	423.515.003	-	423.515.003	-
2	Alat Bengkel Bermesin	10	28.390.000	2.839.000	1.419.500	4.258.500	24.131.500
3	Alat Ukur	5	11.050.000	5.932.000	848.000	6.780.000	4.270.000
4	Alat Kantor	5	210.507.588	161.750.588	11.830.980	173.581.568	36.926.020
5	Alat Rumah Tangga	5	1.021.589.130	841.604.802	41.538.863	881.944.665	139.644.465
6	Alat Studio	5	34.398.000	16.794.600	2.709.800	19.504.400	14.893.600
7	Alat Komunikasi	5	42.677.250	32.277.250	2.080.000	34.357.250	8.320.000
8	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15	10.843.050	3.252.915	361.435	3.614.350	7.228.700
9	Komputer Unit	4	949.861.287	595.506.386	71.765.394	667.271.780	282.589.507
10	Peralatan Komputer	4	341.965.320	229.284.713	24.066.702	253.351.415	88.613.905
11	Alat Kerja Penerbangan	3	305.085.000	138.011.500	15.254.250	153.265.750	151.819.250
	Jumlah		3.379.881.628	2.450.768.757	171.874.924	2.621.444.681	758.436.947
C	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	7.103.738.240	387.717.726	74.636.498	462.354.224	6.641.384.016
2	Tugu/ Tanda Batas	50	1.651.396.000	115.597.720	16.513.960	132.111.680	1.519.284.320
3	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	2.374.311.000	202.955.474	40.591.095	243.546.569	2.130.764.431
	Jumlah		11.129.445.240	706.270.920	131.741.553	838.012.473	10.291.432.767
D	Jaringan dan Irigasi						
1	Jaringan Listrik	40	54.738.200	17.789.915	684.228	18.474.143	36.264.057
2	Bangunan Air Irigasi	50	13.958.000	872.375	174.475	1.046.850	12.911.150
	Jumlah		68.696.200	18.662.290	858.703	19.520.993	49.175.207
E	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan						
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	14.000.000	14.000.000	-	-	-
9	Peralatan Komputer	4	950.000	950.000	-	950.000	-
	Jumlah		14.950.000	14.950.000	0	950.000	0
Total			14.592.973.068	3.190.651.967	304.475.180	3.493.928.147	11.099.044.921

* Beban Amortisasi